

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 *State of the Art*

Perkembangan penerapan TIK berkembang pesat di seluruh dunia, banyak dari pemerintahan baik di negara maju maupun berkembang telah menerapkan *Electronic Government* untuk mendigitalisasikan proses bisnis di pemerintahan (Novis Prasetyawan, Endroyono, and Supeno Mardi Susiki Nugroho, 2019). Berdasarkan *survey* yang telah dilakukan oleh United Nations (UN) terhadap penerapan *E-Government* di Indonesia berada pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Lalu di tahun 2022 *United Nations (UN) E-Government Survey* menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Supriyanto, Asep Ridwan, Rachmat Tamam, M Iman Santoso, Dhimas Satria, and Ade Irman, 2021). Penerapan *E-Government* diharapkan mampu membangun efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis pemerintahan, dan mampu mengakomodir aspek penting terkait *IT Governance* yaitu *People, process and technology*, maka dari itu dilakukan evaluasi kembali terhadap instrumen penilaian SPBE, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperlukan Perancangan Kriteria *People Capability Maturity Model* untuk menyempurnakan Instrumen Penilaian SPBE agar memenuhi unsur *People, Process and Technology* terkait *IT Governance* (Indri Sudanawati Rozas, Khalid, Nita Yalina, Noor Wahyudi and Dwi Rolliawati, 2022).

1.2 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada *digitalisasi* menuntut pemerintah untuk lebih responsif. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi internal birokrasi dan bagi publik atau masyarakat. Selain itu, SPBE merupakan fondasi pelaksanaan transformasi *digital* pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0 sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Perkembangan Teknologi memunculkan *trigger* untuk menerapkan teknologi pada setiap unit untuk mendukung proses bisnis ,masing-masing unit di lembaga pemerintahan, namun seringkali terjadi *overlapping* akibat kurangnya koordinasi dan sosialisasi, bahkan *overlapping* sistem/aplikasi juga terjadi bukan hanya di internal suatu lembaga, namun juga antar lembaga, yang memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga pemerintah pada tahun 2018 memutuskan suatu solusi berupa SPBE dimana SPBE berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya *overlapping* sistem/aplikasi antar unit/lembaga pemerintahan.

Selanjutnya SPBE yang diterapkan memiliki beberapa prinsip diantaranya:

- Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- Kesenambungan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE

- Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna
- Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE
- Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan sumber daya yang mendukung SPBE.

Urgency Pelaksanaan SPBE adalah sebagai bentuk *compliance* terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang secara rinci dan *explicit* tertuang pada Permenpanrb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Kepmenpanrb 962 2021 Pedoman Teknis Evaluasi SPBE.

SPBE merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IT *Governance*, yang menitik beratkan pada 3 unsur utama yaitu *People, process and technology*, Saat ini pemerintah sangat kosen terhadap pengembangan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Andi Mahardika, Dinda Salsabila Yaswi, Kiki Fitria Damayanti, dan M. Syahrul A, 2023). Berdasarkan survei, Indonesia naik 11 peringkat pada tahun 2020 (Department of Economic and Social Affairs).

Dikarenakan SPBE adalah bagian dari IT *governance* dan belum memiliki instrumen khusus untuk menilai tingkat maturitas penerapan SDM TI SPBE dan perlunya untuk mengakomodir 3 aspek penting IT *governance*, Untuk mendukung hal tersebut, perlu perancangan kriteria *People capability maturity model* untuk menyempurnakan instrumen penilaian SPBE agar memenuhi unsur *People, process and technology* terkait IT *Governance* (Indri Sudanawati Rozas, Khalid, Nita Yalina, Noor Wahyudi and Dwi Rolliawati, 2022). Untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan *Review* terkait beberapa konsep berupa *framework* yang memiliki relevansi terkait perancangan instrumen penilaian yang akan dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Permenpanrb Nomor 59 Tahun 2020 merupakan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE terdiri dari beberapa *domain* diantaranya: kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Saat ini Instrumen penilaian SPBE belum mengakomodir secara spesifik terkait aspek *People* atau SDM TI pada instrumen penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sehingga Perlu melakukan perancangan Kriteria *People capability maturity model* untuk melengkapi *domain People* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pada penelitian ini fokus pada perancangan kriteria *People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil dari rancangan *People capability maturity model* yang didefinisikan akan divalidasi berdasarkan *Expert judgment, Content Validity Index* dan *Content Validity ratio*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi instrumen penilaian SPBE melalui *focus group discussion* bersama panel ahli/*expert judgment* yang sudah berpengalaman dalam menggunakan dan menerapkan instrumen penilaian SPBE .
2. Merancang kriteria *People capability maturity model* untuk menyempurnakan instrumen penilaian SPBE agar memenuhi unsur *People, process and technology* terkait IT *governance*.

1.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana proses kriteria *people capability maturity model* didefinisikan?
2. Siapa pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan kriteria *people capability maturity level* SPBE ?
3. Bagaimana cara menggunakan rancangan kriteria *people capability maturity level* SPBE ?
4. Pihak mana saja yang boleh menggunakan rancangan kriteria *people capability maturity level* SPBE ?

1.6 Lingkup Penelitian

Adapun lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Ruang lingkup masalah:

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perancangan kriteria *People capability maturity model* untuk menyempurnakan instrumen penilaian SPBE agar memenuhi unsur *People, process and technology* terkait IT *Governance*.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu lembaga/instansi pemerintah yang berada di wilayah Jakarta.

3. Waktu dan periode

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan memperhatikan pedoman teknis penilaian SPBE dan kerangka kerja yang relevan untuk perancangan kriteria *People capability maturity model* untuk menyempurnakan instrumen penilaian SPBE agar memenuhi unsur *People, process and technology* terkait IT *Governance*.

1.7 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terkait evaluasi instrumen SPBE sudah pernah dilaksanakan, penelitian sebelumnya melakukan evaluasi tersebut berdasarkan instrumen penilaian yang sudah ada, namun belum ditemukan penelitian yang justru mengevaluasi instrumen penilaian itu sendiri, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi instrumen penilaian itu sendiri apakah sudah mengakomodir aspek *IT governance (People, Process and Technology)* atau belum. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, teridentifikasi bahwa instrumen penilaian saat ini belum mengakomodir aspek *People*, sehingga peneliti merancang kriteria *People capability maturity model* untuk menyempurnakan Instrumen Penilaian SPBE agar memenuhi unsur *People, process and technology* terkait *IT governance*.

1.8 Batasan Masalah

Adapun batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan usulan *kriteria People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Penelitian ini hanya menggunakan 1 *framework* yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan penyusunan usulan *kriteria People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

1.9 Rasionalisasi Penelitian

Rasionalisasi studi penyusunan usulan *kriteria People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), merupakan suatu proses yang memiliki signifikansi penting dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tingkat kematangan dalam aspek pengelolaan/manajemen SDM TI, dan ini merupakan aspek yang penting dalam memenuhi aspek *IT governance* yang tidak hanya fokus pada elemen *process and technology*, namun juga elemen *People* atau SDM TI.

Alasan pemilihan fokus/judul tesis perancangan *kriteria people capability maturity model* untuk menyempurnakan instrumen penilaian SPBE agar memenuhi unsur *people, process, and technology* terkait *IT governance*, karena perlunya melakukan penyempurnaan terkait instrumen penilaian SPBE agar mengakomodir elemen-elemen *IT governance*.

1.10 Signifikansi Penelitian

Rancangan *kriteria People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), merupakan suatu proses yang memiliki signifikansi penting dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tingkat kematangan dalam aspek pengelolaan/manajemen SDM TI. Dalam konteks ini, usulan *kriteria People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan dan area yang memerlukan peningkatan, dengan tujuan meningkatkan tingkat kematangan pengelolaan SDM TI. Dalam pelaksanaannya, asesmen kematangan memberikan

kerangka evaluatif yang sistematis untuk mengukur dan menganalisis sejumlah dimensi kritis yang terkait pengelolaan SDM TI.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penyempurnaan instrumen penilaian dengan penambahan *domain people* beserta rancangan kriteria *people capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik [SPBE], dan juga memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi yang dapat dijadikan referensi bagi lembaga terkait/peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut.

1.11 Peran Peneliti

Pada penelitian peneliti memiliki peran diantaranya:

1. Merencanakan Penelitian: Peneliti harus merencanakan penelitiannya dengan cermat, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, merancang metodologi penelitian, memilih teknik pengumpulan data, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan.
2. Melakukan Penelitian: Peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan data sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan, melalui analisis literatur atau data yang sudah ada).
3. Analisis Data: Setelah data terkumpul, peneliti harus menganalisis data tersebut dilanjutkan dengan menyusun rancangan usulan *kriteria People capability maturity model* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik [SPBE].
4. Interpretasi Hasil: Peneliti harus mengartikan hasil analisis dengan cermat, menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian dan konteks yang lebih luas. Kemampuan untuk memberikan interpretasi yang berdasarkan bukti adalah kunci dalam peran peneliti.

1.12 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan teori dasar serta kajian-kajian literatur pendukung untuk penelitian dan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III Metodologi Penelitian

Menjelaskan konseptual model. Adapun metode yang digunakan yaitu metode konseptual dan sistematika penelitian yang digunakan pada riset ini.

BAB IV Pengumpulan Dan Analisis Data

Melakukan analisis dan Penyusunan Kriteria *People Capability Maturity Model* Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk melengkapi *domain People*. Dan dilanjutkan ke tahap pengujian yang akan dilakukan oleh panel ahli (*Expert judgement*) terhadap rekomendasi yang diusulkan. Rekomendasi tersebut diperiksa dan divalidasi melalui diskusi dengan metode *Expert judgment, Content Validity Index* dan *Content Validity ratio*.

BAB V Hasil Akhir Rancangan Instrumen Penilaian

Berisi kesimpulan dan saran. Simpulan hasil dari penelitian yang dilakukan serta saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan penelitian berikutnya.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dan saran. Simpulan hasil dari penelitian yang dilakukan serta saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan penelitian berikutnya.

BAB VII Daftar Pustaka

Berisi daftar referensi yang digunakan